

**PERAN GURU PPKn DALAM UPAYA PENGUATAN NILAI-NILAI  
KEBHINNEKAAN DI SMP NEGERI 1 PADANGRATU LAMPUNG  
TENGAH TAHUN PELAJARAN 2017/2018**

**(Skripsi)**

Oleh

*Gangsar Juhanggito*



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

## **ABSTRAK**

### **PERAN GURU PPKn DALAM UPAYA PENGUATAN NILAI-NILAI KEBHINNEKAAN DI SMP NEGERI 1 PADANGRATU LAMPUNG TENGAH TAHUN PELAJARAN 2017/2018**

**Oleh**  
**Gangsar Juhanggito**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis : Peran guru PPKn dalam upaya penguatan nilai-nilai kebhinnekaan di SMP Negeri 1 padangratu lampung tengah tahun pelajaran 2017/2018.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey dengan jenis pendekatan deskriptif kuantitatif, karena penelitian ini menggambarkan keadaan yang terjadi dalam lingkungan peserta didik di SMP Negeri 1 Padangratu mengenai peran guru PPKn dalam upaya penguatan nilai-nilai kebhinnekaan. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 56 responden. Analisis data menggunakan Chi kuadrat dan teknik pengumpulan data menggunakan angket dan teknik penunjang menggunakan wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran guru PPKn dalam upaya penguatan nilai-nilai kebhinnekaan di SMP Negeri 1 padangratu Lampung Tengah masuk dalam kategori baik. Artinya peran guru PPKn dalam upaya penguatan nilai-nilai kebhinnekaan pada peserta didik dapat dikatakan berperan dengan baik.

**Kata kunci:** guru, nilai, kebhinnekaan.

**PERAN GURU PPKn DALAM UPAYA PENGUATAN NILAI-NILAI  
KEBHINNEKAAN DI SMP NEGERI 1 PADANGRATU LAMPUNG  
TENGAH TAHUN PELAJARAN 2017/2018**

Oleh

*Gangsar Juhanggito*

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
**SARJANA PENDIDIKAN**

Pada

Progam Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Jurusan Pendidikan Ilmu Pendidikan Sosial



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

Judul Skripsi : **PERAN GURU PPKn DALAM UPAYA  
PENGUATAN NILAI-NILAI KEBHINNEKAAN DI  
SMP NEGERI 1 PADANGRATU LAMPUNG  
TENGAH TAHUN PELAJARAN 2017/2018**

Nama Mahasiswa : **Gangsar Juhanggito**

No. Pokok Mahasiswa : **1413032027**

Program Studi : **Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**

Jurusan : **Pendidikan IPS**

Fakultas : **Keguruan dan Ilmu Pendidikan**



**MENYETUJUI**  
1. Komisi Pembimbing

Pembimbing I,

**Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd.**  
NIP 19820727 200604 1 002

Pembimbing II,

**Drs. Berchah Pitoewas, M.H.**  
NIP 19611214 199303 1 001

2. Mengetahui

Ketua Jurusan  
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

**Drs. Zulkarnain, M.Si.**  
NIP 19600111 198703 1 001

Ketua Program Studi PPKn

**Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd.**  
NIP 19820727 200604 1 002

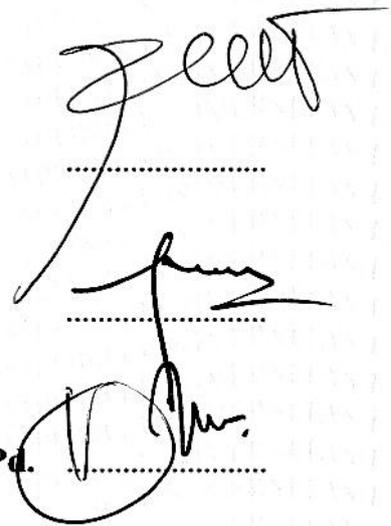
**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd.**

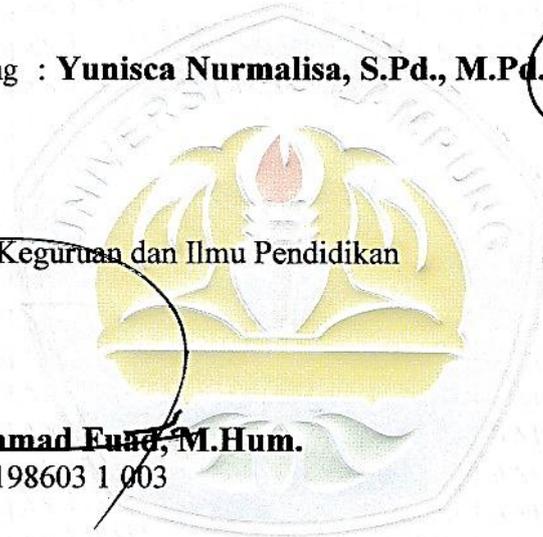
Sekretaris : **Drs. Berchah Pitoewas, M.H.**

Penguji  
Bukan Pembimbing : **Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd.**



2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

**Dr. H. Muhammad Fuzi, M.Hum.**  
NIP. 19590722 198603 1 003



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **07 Agustus 2018**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, adalah :

Nama : Gangsar Juhanggito  
NPM : 1413032027  
Prodi/ Jurusan : PPKn/ Pendidikan IPS  
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Alamat : Jalan Koprak Wahab Sriagung Kecamatan Padangratu  
Kabupaten Lampung Tengah

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.

Bandar Lampung, Agustus 2018

Penulis



Gangsar Juhanggito  
NPM 1413032027

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Sriagung kec. Padangratu kab.

Lampung Tengah pada tanggal 1 Juni 1996, sebagai anak pertama dari tiga bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak

Paimin dan Ibu Poniwati. Pendidikan Taman Kanak-kanak di

TK Dharma wanita Sriagung Padangratu diselesaikan tahun 2003,

Pendidikan Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SD Negeri 1 Sriagung

padangratu Lampung Tengah pada tahun 2008, Sekolah Menengah Pertama

(SMP) diselesaikan di SMP Negeri 1 Padangratu Lampung Tengah pada

tahun 2011 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 1 Kalirejo

Lampung Tengah pada tahun 2014.

Pada tahun 2014 Penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Program Studi

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurusan Pendidikan Ilmu

Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas

Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri

(SNMPTN). Penulis pernah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata

Kependidikan Terintegrasi (KKN-KT) di Pekon Karang Agung Kecamatan

Way Tenong Kabupaten Lampung Barat dan Praktik Pengalaman

Kependidikan (PPK) di SMP Negeri Satu Atap 1 Way Tenong Lampung

Barat.

## **PERSEMBAHAN**

*Setulus hatiku kupersembahkan karya kecilku ini sebagai tanda  
baktiku  
kepada :*

*Bapakku (Paimin) dan Bundaku (Poniyati) tercinta yang telah  
membesarkanku dengan penuh kasih sayang dan kesabaran  
yang luar biasa dalam mendidik, membimbing, memberikan  
semangat, dan senantiasa berdo'a demi keberhasilanku.*

*Almamater tercinta Universitas Lampung.*

# MOTTO

*Gapailah Ilmu Kehidupan Dalam Nilai-Nilai keagamaan Hingga*

*Seakan Melampaui Batas Kemampuan Diri.*

*(Gangsar Juhanggito)*

## SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Peran Guru PPKn dalam Upaya Penguatan Nilai-Nilai kebhinnekaan di SMP Negeri 1 padangratu Lampung Tengah Tahun pelajaran 2017/2018”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan di Universitas Lampung. terselesaikannya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari hambatan yang datang baik dari luar maupun dalam diri penulis. Berkat bimbingan, saran serta bantuan baik moral maupun spiritual serta arahan dan motivasi dari berbagai pihak sehingga segala kesulitan dapat terlewati dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd. selaku Pembimbing I dan Bapak Drs. Berchah Pitoewas, M.H. selaku Pembimbing II sekaligus pembimbing akademik, serta semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi sehingga bisa terselesaikan. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Hi. Muhammad Fuad, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Abdurrahman, M.Si selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
3. Bapak Drs. Hi. Buchori Asyik, M.Si, selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

4. Bapak Drs. Supriyadi, M.Pd, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
5. Bapak Drs. Zulkarnain, M.Si selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
6. Bapak Hermi yanzi, S.Pd.,M.Pd, selaku Pembimbing I dan sekaligus ketua program studi PPKn, dan Bapak Drs. Berchah Pitoewas, M.H. selaku Pembimbing II dan sekaligus pembimbing akademik terimakasih atas segala saran dan masukannya.
7. Ibu Yunisca Nuralisa, S.Pd., M.Pd, selaku Pembahas I dan Bapak Susilo, S.Pd.,M.Pd. selaku Pembahas II terimakasih atas masukan dan sarannya.
8. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, terimakasih atas segala ilmu yang telah diberikan, saran, masukan serta segala bantuan yang diperlukan.
9. Terimakasih kepada kedua orang tuaku tercinta serta adik - adikku serta seluruh keluarga besarku atas doa, senyum, dukungan, kasih sayang yang telah diberikan
10. Bapak Siswandi, S.pd.M.M. yang telah memberikan izin penelitian untuk penulisan skripsi ini.
11. Terimakasih kepada seluruh guru dan staf tata usaha SMP Negeri 1 Padangratu Lampung Tengah yang telah bersedia membantu dan memberikan segala bantuan yang diperlukan selama mengadakan penelitian..

12. Keluarga Besar Civic Education angkatan 2014 terimakasih telah menjadi keluarga baruku yang memberikan cerita baru dalam perjalanan hidupku. Terimakasih atas doa dan dukungannya. Semoga akhir perkuliahan ini bukan menjadi akhir dari pertemanan dan kebersamaan kita, kalian teristimewa.
13. Kakak – kakak dan adik – adik Civic Education yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas doa dan dukungannya.
14. Sahabat-sahabat terbaikku, Eki Fatkhurrahman, M Bimo Sakti, Achmad Susanto, Arip Gunawan, Dwi Rimbawan, Rino Pangesti, Budi Setio N, Ridwan Santoso, M Ali Hanafi dan Nursidik yang selalu memberi semangat.
15. Keluarga besar KKN-KT SMP N Satu Atap 1 Way Tenong Lampung Barat, Bpk. Maman sekeluarga besar, kawan-kawan satu kelompok Adit, Debi, Erik, Lia, Isnaini, Siti dan Mayang yang selalu memberi dukungan.
16. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga ketulusan bapak, ibu serta rekan – rekan mendapat pahala dari Allah SWT. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kemajuan dunia pendidikan kita khususnya Pendidikan Pancasila dan Kewarnanegaraan.

Bandarlampung, Agustus 2018

Penulis

Gangsar Juhangito  
NPM. 1413032027

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>v</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>viii</b>
<b>SANWACANA.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xviii</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	11
C. Batasan Masalah.....	11
D. Rumusan Masalah .....	12
E. Tujuan Penelitian.....	12
F. Kegunaan Penelitian.....	12
1. Kegunaan Teoritis.....	12
2. Kegunaan Praktis .....	13
G. Ruang Lingkup Penelitian .....	13
1. Ruang Lingkup Ilmu.....	13
2. Subyek Penelitian .....	13
3. Objek Penelitian .....	14
4. Lokasi Penelitian .....	14
5. Waktu Penelitian .....	14

## II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teoritis .....	15
1. Tinjauan Pengertian Peran. ....	15
2. Peran guru PPKn.....	18
3. Pengertian Nilai-Nilai Kebhinnekaan .....	21
a. Sejarah Lahirnya Lambang Negara.....	25
b. Makna Lambang Negara.....	28
c. Makna dan Konsep Bhinneka Tunggal Ika.....	32
d. Prinsip yang Terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika .....	37
e. Implementasi bhinneka Tunggal Ika.....	39
f. Teori Multikulturalisme .....	41
B. Kajian Penelitian Yang Relevan .....	42
C. Kerangka Pikir .....	43

## III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian .....	45
B. Populasi dan Sampel .....	46
1. Populasi .....	46
2. Sampel.....	46
C. Variabel Penelitian.....	48
D. Definisi Variabel.....	48
1. Definisi Konseptual.....	48
2. Definisi Operasional.....	49
E. Rencana Pengukuran Variabel.....	50
F. Teknik Pengumpulan Data.....	50
1. Teknik Pokok .....	50
a. angket .....	50
2. Teknik Penunjang.....	51
a. Wawancara .....	51
b. Dokumentasi.....	52
c. Observasi .....	52
G. Uji Validitas dan Reabilitas .....	52
1. Uji Validitas .....	52
2. Uji Reabilitas.....	53
H. Teknik Analisis Data.....	54

<b>IV.</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A.	Langkah-langka Penelitian.....	58
1.	Persiapan Pengajuan Judul.....	58
2.	Penelitian Pendahuluan.....	59
3.	Pengajuan Rencana Penelitian.....	59
4.	Pelaksanaan Penelitian.....	60
a.	Persiapan Administrasi.....	60
b.	Penyusunan Alat Pengumpulan Data.....	60
B.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	66
1.	Sejarah Singkat Berdirinya Sekolah.....	66
2.	Visi Misi Sekolah.....	68
C.	Deskripsi Data.....	72
1.	Pengumpulan Data.....	72
2.	Penyajian Data.....	72
D.	Pembahasan.....	103
<b>V.</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A.	Kesimpulan.....	115
B.	Saran.....	116

**DAFTAR PUSTAKA****LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1. Data Hasil Pra-Survey.....	46
2. Data Jumlah Populasi Peserta .....	46
3. Data Jumlah Sebaran Sampel.....	47
4. Distribusi Skor hasil uji coba angket 10 orang di luar responden untuk item ganjil (X).....	62
5. Hasil Uji Coba Angket Kepada 10 Responden di luar Populasi untuk item Genap (Y) .....	63
6. Distribusi Antara Item Ganjil ( X) dan item Genap (Y) dari uji coba angket kepada 10 Responden di luar Populasi.....	64
7. Interpretasi Nilai r .....	65
8. jumlah peserta didik SMP Negeri 1 Padangratu .....	69
9. Jumlah Guru SMP Negeri 1 Padangratu .....	70
10. Distribusi skor hasil angket dari indikator Pemahaman.....	72
11. Distribusi Frekuensi dari Indikator Pemahaman.....	75
12. Distribusi skor hasil angket dari indikator Mengarahkan .....	76
13. Distribusi Frekuensi dari Indikator Mengarahkan .....	78
14. Distribusi skor hasil angket dari indikator Mengawasi.....	79
15. Distribusi Frekuensi dari Indikator Mengawasi.....	81
16. Distribusi Hasil Angket Variabel Peran Guru.....	82
17. Distribusi Frekuensi dari Variabel Peran Guru.....	84

18. Distribusi skor hasil angket dari indikator Menggali Nilai-Nilai Kebhinnekaan.....	85
19. Distribusi Frekuensi dari Indikator Menggali Nilai-Nilai kebhinnekaan.....	88
20. Distribusi skor hasil angket dari indikator Menanamkan Nilai-Nilai Kebhinnekaan .....	88
21. Distribusi Frekuensi dari Indikator Menanamkan Nilai-Nilai Kebhinnekaan.....	91
22. Distribusi skor hasil angket dari indikator Menguatkan Nilai-Nilai Kebhinnekaan.....	92
23. Distribusi Frekuensi dari Indikator Menguatkan Nilai-Nilai Kebhinnekaan.....	94
24. Distribusi Skor Angket Variabel Penguatan Nilai-Nilai Kebhinnekaan (Y).....	95
25. Distribusi Frekuensi dari Variabel Penguatan Nilai-Nilai Kebhinnekaan.....	97
26. Perbandingan Jumlah Responden Peran Guru PPkn(X) dan Penguatan Nilai- Nilai Kebhinnekaan(Y) di SMP Negeri 1 Padangratu Lampung Tengah.....	98
27. Kontingensi peran guru PPKn dalam upaya penguatan nilai-nilai kebhinnekaan di SMP Negeri 1 Padangratu Lampung tengah.....	99
28. peran guru PPKn dalam upaya penguatan nilai-nilai kebhinnekaan di SMP Negeri 1 Padangratu Lampung tengah .....	100

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
1. Bagan Kerangka Pikir .....	44

## **DAFTAR LAMPIRAN**

### **Lampiran**

1. Rencana Judul Kaji Tindak/Skripsi Makalah
2. Surat Keterangan Judul dari Wakil Dekan I FKIP UNILA
3. Surat Izin Penelitian Pendahuluan
4. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Pendahuluan
5. Lembar Persetujuan seminar Proposal
6. Surat Keterangan Telah melaksanakan Seminar Proposal
7. Kartu Perbaikan Proposal Pembahas II
8. Kartu Perbaikan Proposal Pembahas I
9. Kartu Perbaikan Proposal Pembimbing II
10. Kartu Perbaikan Proposal Pembimbing I
11. Surat Rekomendasi
12. Surat Izin Penelitian
13. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
14. Lembar Persetujuan Seminar Hasil
15. Surat Keterangan
16. Kartu Perbaikan Hasil Pembahas
17. Kartu Perbaikan hasil Pembimbing II
18. Kartu Perbaikan hasil Pembimbing I
19. Surat Rekomendasi
20. Kisi-Kisi Angket
21. Angket Penelitian

## **1. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pendidikan menjadi salah satu unsur yang sangat penting dalam membangun Indonesia, Sehingga pendidikan menjadi prioritas Negara Indonesia dalam pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dimana pemerintah telah menetapkan anggaran pendidikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Untuk meningkatkan mutu masyarakat Indonesia dari segi pengetahuan dan ketrampilan masyarakat Indonesia itu sendiri maka pendidikan merupakan jalan mutlak yang harus ditempuh setiap generasi muda penerus bangsa.

Pendidikan adalah usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan kebudayaan, Ikhsan (2003:2). Sehingga kemajuan suatu bangsa tidak terlepas dari faktor pendidikan, karena pendidikan mempunyai peranan penting dalam usaha meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang merupakan unsur penting dalam pembangunan suatu bangsa. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang pendidikan nasional mendefinisikan yaitu “pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,

kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”. Berdasarkan Undang-Undang tersebut maka pendidikan memiliki peranan yang sangat penting untuk menjamin perkembangan dan kelangsungan kehidupan bangsa karena pendidikan merupakan suatu proses dalam membentuk manusia yang cerdas dan terampil, mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan kreatif serta mampu bersaing dalam menghadapi tantangan dan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi.

Tujuan pendidikan pada dasarnya menghantarkan para peserta didik menuju pada perubahan-perubahan tingkah laku baik intelektual, moral maupun sosial agar dapat hidup mandiri sebagai individu dan makhluk sosial sehingga menghasilkan sumber daya manusia berdaya saing tinggi. Usaha dalam rangka mencapai tujuan pendidikan, maka penyelenggaraan pendidikan perlu di sesuaikan dengan pembangunan dan perubahan masyarakat yang sedang membangun. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal paling vital dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui interaksi dalam proses pembelajaran di sekolah yang dilakukan secara sadar, sistematis dan terarah menuju ke arah perubahan tingkah laku peserta didik dengan yang diharapkan.

Sistem pendidikan Indonesia disusun berlandaskan kepada kebudayaan bangsa Indonesia dan mendasar pada Pancasila dan UUD 1945 sebagai bentuk perwujudan nilai-nilai hidup bangsa Indonesia. Dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 juga menjelaskan Visi dan Misi Pendidikan Nasional yaitu “Visi Pendidikan Nasional adalah mewujudkan sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar

berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu hidup dan berkembang dalam tantangan zaman yang selalu berubah. “Misi Pendidikan Nasional yaitu Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia, Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar, Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral, Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan, ilmu pengetahuan, ketrampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global, Memberdayakan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks NKRI.

Guru merupakan tenaga pendidik yang menjadi panutan dan menjadi tokoh yang perkataannya dipercaya, guru merupakan *key person* dalam kelas, guru yang memimpin dan mengarahkan kegiatan belajar para peserta didik. Apabila pendidikan dilihat sebagai proses produksi maka guru merupakan salah satu input instrumental yang bertanggung jawab mengembangkan potensi peserta didik yang memiliki ilmu pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang lebih sempurna. Guru harus berusaha menjelaskan segala sesuatu dalam konteks pembelajaran kepada peserta didik dengan jelas dan terampil dalam memecahkan masalah. Terdapat beberapa hal yang harus dilakukan oleh seorang guru dalam pembelajaran antara lain Mendefinisikan, menganalisis, Mensintesis, Bertanya, Merespon, Mendengarkan, Membuat ilustrasi, Menciptakan kepercayaan, Memberikan

pandangan yang bervariasi, menyediakan media untuk mengkaji materi standar, menyesuaikan metode pembelajaran, memberikan nada perasaan.

Agar pembelajaran memiliki kekuatan yang maksimal, guru-guru harus senantiasa berusaha untuk mempertahankan dan meningkatkan semangat yang telah ketika mempelajari materi standar. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dijelaskan bahwa “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”. Kedudukan guru sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Peran guru dalam pembelajaran merupakan tindakan atau perilaku guru dalam mempengaruhi peserta didik dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sikap dan perilaku seorang guru menjadi contoh atau suri tauladan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya, khusus peserta didiknya di dalam kelas dan masyarakat pada umumnya. Ucapan seorang guru penuh dengan nilai-nilai kebenaran, perilakunya menunjukkan perilaku yang santun bagi lingkungannya, dan sikapnya menunjukkan kasih sayang bagi sesama. Guru memiliki peran yang sangat strategis dalam memberdayakan peserta didiknya. Kemampuan guru dalam memilih pendekatan pembelajaran sangat mempengaruhi keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran. Peran guru membimbing

secara aktif, membantu peserta didik dalam prosedur pembelajaran, menelaah materi dan permasalahan, kemampuan yang diperlukan adalah pemahaman guru memahami kecakapan dan kejelian peserta didik dalam belajar baik secara individu maupun kelompok sehingga kebersamaan dalam menganalisis permasalahan dari berbagai sudut pandang. cara ini peserta didik akan merasakan adanya motivasi untuk belajar dan merasakan kepuasan dalam belajar. Motivasi dan rasa puas yang dimiliki peserta didik akan mendorong dirinya memiliki kepekaan diri, rasa percaya diri, berani menyampaikan pendapat dan berani mengambil keputusan secara bebas. Guru adalah pendidik yang menjadi tokoh panutan dan identifikasi bagi para peserta didik dan lingkungannya.

Kurikulum 2013 mengandung misi untuk menerapkan paradigma pendidikan untuk membentuk manusia mandiri dan berkepribadian melalui pengembangan pendidikan berbasis karakter. Dalam mengembangkan pendidikan berbasis karakter, kurikulum mengadopsi kearifan lokal serta vokasi yang beragam yang disesuaikan dengan kebutuhan geografis, bakat, serta potensi peserta didik.

Pendidikan dan kebudayaan menurut Ki Hadjar Dewantara (1954:44) merupakan sistem among. Hal ini berarti pendidikan tidak hanya sekedar mencetak generasi yang berpengetahuan dan cerdas, pendidikan juga mengembangkan budi pekerti peserta didik sesuai kebudayaan bangsa.

masyarakat Indonesia adalah sebuah masyarakat yang majemuk atau *plural society*. Dalam kajian Furnival Hefner (2007) Nasikun (2007) masyarakat majemuk dipahami sebagai masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih elemen atau tatanan sosial yang hidup berdampingan, namun tanpa membaaur dalam satu unit politik yang tunggal. Hefner (2007) memperkuat pernyataan Furnival di atas

dengan menggambarkan tantangan pluralisme budaya yang dimiliki Indonesia secara lebih mencolok dan dianggap sebagai lokus klasik bagi bentukan masyarakat majemuk. Clifford Geertz (1996) sebagaimana ditulis Hardiman (2002) mengakui sulit melukiskan anatomi Indonesia secara persis. Negara ini, bukan saja multietnis (seperti Dayak, Kutai, Makasar, Bugis, Jawa, Sunda, Batak, Aceh, Flores, Bali, dan seterusnya), tetapi juga menjadi medan pertarungan pengaruh multimental dan ideologi (seperti India, Cina, Belanda, Portugis, Hinduisme, Budhisme, Konfusianisme, Islam, Kristen, Kapitalisme, dan seterusnya). Geertz juga melukiskan “Indonesia sebagai sejumlah ‘bangsa’ dengan ukuran, makna dan karakter yang berbeda-beda yang melalui sebuah narasi agung yang bersifat historis, ideologis, religius atau semacam itu disambung-sambung menjadi sebuah struktur ekonomis dan politis bersama”. Dalam masyarakat Indonesia yang majemuk itu, ada dua istilah yang penting dipahami yaitu kemajemukan (pluralitas) dan keanekaragaman (heterogenitas).

Pluralitas sebagai kontraposisi dari singularitas mengindikasikan adanya suatu situasi yang terdiri dari kejamakan, dan bukan ketunggalan, Kusumohamidjojo (2000). Artinya, dalam “masyarakat Indonesia” dapat dijumpai berbagai subkelompok masyarakat yang tidak bisa disatukelompokkan satu dengan yang lainnya. Adanya tidak kurang dari 500 suku bangsa di Indonesia menegaskan kenyataan itu. Demikian pula halnya dengan kebudayaan mereka. Sementara heterogenitas yang merupakan kontraposisi dari homogenitas mengindikasikan suatu kualitas dari keadaan yang menyimpan ketidaksamaan dalam unsur-unsurnya, Kusumohamidjojo (2000). Artinya, masing-masing subkelompok masyarakat itu beserta kebudayaannya bisa sungguh-sungguh berbeda satu dari

yang lainnya. Dalam tulisan ini, pluralitas dan heterogenitas akan dipakai secara bergantian sebagai kebhinnekaan.

Dalam masyarakat Indonesia yang plural dan sekaligus heterogen, tersimpan kekuatan yang sangat besar (sebagai modal sosial dan budaya) berupa beragam adat istiadat, agama dan kepercayaan, bahasa yang berjenis-jenis yang menjadi pengikat kelompok-kelompok masyarakat untuk bersatu menentang penjajahan. Sifat kebhinnekaan Indonesia justru lebih memperkuat keinginan untuk bersatu dalam mencapai cita-cita bersama. Oleh karena itu kebhinnekaan masyarakat Indonesia perlu dilihat sebagai sesuatu yang cair dengan tujuan adil, makmur dan bermartabat bagi tiap warga negara. Cair dalam arti bahwa ada kebutuhan situasional dan kontekstual yang perlu diperbaharui dan/atau direvisi dari waktu ke waktu atau perubahan waktu, Arif (2008).

Keberagaman budaya Indonesia dilengkapi oleh keragaman lain yang ada pada tatanan hidup masyarakat baik perbedaan ras, agama, bahasa, dan golongan politik yang terhimpun dalam suatu ideologi bersama yaitu Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Kansil dan C. Kansil (2006) mengemukakan bahwa “persatuan dikembangkan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, dengan memajukan pergaulan demi kesatuan dan persatuan bangsa”. Sehingga Sasanti Bhineka Tunggal Ika bukan hanya suatu selogan tetapi merupakan pemersatu bangsa Indonesia.

Keberagaman bangsa berlangsung selama berabad-abad lamanya, sehingga Indonesia tumbuh dalam suatu keragaman yang kompleks. Mahfud (2009:10) berpandangan bahwa pada hakikatnya sejak awal para *founding fathers* bangsa Indonesia telah menyadari akan keragaman bahasa, budaya, agama, suku dan etnis kita. Singkatnya bangsa Indonesia adalah bangsa multikultural, maka bangsa

Indonesia menganut semangat Bhinneka Tunggal Ika, hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan persatuan yang menjadi obsesi rakyat kebanyakan. Kunci yang sekaligus menjadi mediasi untuk mewujudkan cita-cita itu adalah toleransi.

Untuk dapat mengimplementasikan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maka perlu untuk memahami secara mendalam prinsip-prinsip yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Dalam rangka membentuk kesatuan dari keanekaragaman tidak terjadi pembentukan konsep baru dari keanekaragaman konsep-konsep yang terdapat pada unsur-unsur atau komponen bangsa. Suatu contoh di negara tercinta ini terdapat begitu anekaragam agama dan kepercayaan. Dengan ke-tunggalan Bhinneka Tunggal Ika tidak dimaksudkan untuk membentuk agama baru. Setiap agama diakui seperti apa adanya, namun dalam kehidupan beragama di Indonesia dicari *common denominator*, yakni prinsip-prinsip yang ditemui dari setiap agama yang memiliki kesamaan, dan *common denominator* ini yang kita pegang sebagai ke-tunggalan, untuk kemudian dipergunakan sebagai acuan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Demikian pula halnya dengan adat budaya daerah, tetap diakui eksistensinya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berwawasan kebangsaan. Faham Bhinneka Tunggal Ika, yang oleh Ir. Sujamto disebut sebagai faham Tantularisme, bukan faham sinkretisme, yang mencoba untuk mengembangkan konsep baru dari unsur asli dengan unsur yang datang dari luar.

- b. Bhinneka Tunggal Ika tidak bersifat sektarian dan eksklusif; hal ini bermakna bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak dibenarkan merasa dirinya yang paling benar, paling hebat, dan tidak mengakui harkat dan martabat pihak lain. Pandangan sektarian dan eksklusif ini akan memicu terbentuknya keakuan yang berlebihan dengan tidak atau kurang memperhitungkan pihak lain, memupuk kecurigaan, kecemburuan, dan persaingan yang tidak sehat. Bhinneka Tunggal Ika bersifat inklusif. Golongan mayoritas dalam hidup berbangsa dan bernegara tidak memaksakan kehendaknya pada golongan minoritas.
- c. Bhinneka Tunggal Ika tidak bersifat formalistis yang hanya menunjukkan perilaku semu. Bhinneka Tunggal Ika dilandasi oleh sikap saling percaya mempercayai, saling hormat menghormati, saling cinta mencintai dan rukun. Hanya dengan cara demikian maka keanekaragaman ini dapat dipersatukan.
- d. Bhinneka Tunggal Ika bersifat konvergen tidak divergen, yang bermakna perbedaan yang terjadi dalam keanekaragaman tidak untuk dibesar-besarkan, tetapi dicari titik temu, dalam bentuk kesepakatan bersama. Hal ini akan terwujud apabila dilandasi oleh sikap toleran, non sektarian, inklusif, akomodatif, dan rukun.

Masyarakat Lampung termasuk tipikal masyarakat multikultural, keberagaman etnis, agama dan ragam budaya lokal menjadi aset bagi daerah yang dijuluki bumi ruwa jurai. Oleh sebab itu penguatan nilai-nilai kebhinnekaan harus ditanamkan sejak pendidikan dasar guna mewujudkan harmonisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai bhinneka tunggal ika. Berdasarkan

observasi yang telah dilaksanakan oleh peneliti pada 14 Februari 2018 di SMP Negeri 1 Padangratu terhadap salah seorang guru mata pelajaran PPKn didapatkan bahwa Nilai-nilai karakter yang terkandung di dalam lingkup masyarakat lampung sendiri masih sangat di junjung tinggi di dalam kehidupan masyarakat asli padangratu yang merupakan masyarakat lampung pepadun, bahkan ada nilai keunikan tersendiri dimana dalam hubungan sosial antara masyarakat lampung padangratu dengan masyarakat suku pendatang, dimana masyarakat lampung asli padangratu merasa ingin selalu di anggap lebih tua karena merasa sebagai penduduk asli daerah lampung.

Pelaksanaan pembelajaran di kelas sebenarnya guru telah menanamkan nilai-nilai karakter seperti rasa bertanggung jawab, kedisiplinan, kejujuran, bertoleransi, kesetiakawanan dan kebersamaan. Namun dalam pelaksanaannya terdapat suatu kendala dimana peserta didik sendiri belum mampu menyerap dengan baik yang telah disampaikan oleh guru, hal tersebut dikarenakan masih terdapatnya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik yang di latar belakang oleh perbedaan etnis, terdapat sebanyak 40% pelanggaran yang terjadi di sebabkan karena miskonsepsi atau atau belum tepatnya pemahaman antara peserta didik yang berasal dari suku asli lampung terhadap peserta didik yang berasal dari suku pendatang.

Lingkungan sekolah peserta didik yang berlatar belakang suku asli sebanyak 30% tidak mau bergaul dengan peserta didik yang berasal dari suku pendatang yang berjumlah sekitar 70% dari total populasi yang ada. Dalam lingkup pergaulan peserta didik yang berasal dari suku asli lampung merasa mereka adalah penduduk asli bukan pendatang, sehingga nilai-nilai kebersamaan sendiri hanya mereka

berlakukannya terhadap teman yang sama-sama berasal dari suku Lampung sehingga mengakibatkan seringnya terjadi konflik yang disebabkan perbedaan tersebut, apabila dikaitkan dengan prinsip-prinsip yang ada dalam nilai-nilai kebhinnekaan maka masih bersifat formalistis dan divergen. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana peran guru PPKn dalam upaya penguatan nilai-nilai kebhinnekaan di SMP Negeri 1 Padangratu tahun pelajaran 2017/2018.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, maka masalah ini dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Peran guru PPKn dalam upaya penguatan nilai-nilai kebhinnekaan terhadap peserta didik.
2. Faktor yang mempengaruhi peran guru PPKn dalam upaya penguatan nilai-nilai kebhinnekaan di lingkungan sekolah
3. Pemahaman peserta didik dalam memahami pentingnya penanaman nilai-nilai kebhinnekaan.

## **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi masalah pada masalah :

Bagaimanakah peran guru PPKn dalam upaya penguatan nilai-nilai kebhinnekaan di SMP Negeri 1 Padangratu Lampung Tengah Tahun Pelajaran 2017 / 2018 ?

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah, permasalahan pada penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

Bagaimanakah peran guru PPKn dalam upaya penguatan nilai-nilai kebhinnekaan di SMP Negeri 1 Padangratu Lampung Tengah Tahun Pelajaran 2017/2018 ?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis : peran guru PPKn dalam upaya penguatan nilai-nilai kebhinnekaan di SMP Negeri 1 Padangratu Lampung Tengah Tahun Pelajaran 2017/2018.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

##### **a. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini berguna untuk membangun konsep ilmu pendidikan kewarganegaraan dalam kawasan pendidikan khususnya untuk menguatkan

nilai-nilai kebhinnekaan sebagai landasan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

#### b. Kegunaan Praktis

Secara praktis dalam penelitian ini diharapkan agar dapat digunakan sebagai:

1. Sebagai masukan untuk sekolah dalam upaya penggalian, penguatan dan pelestarian nilai-nilai kebhinnekaan.
2. Sebagai bahan pedoman guru dalam menanamkan nilai-nilai kebhinnekaan sebagai identitas bangsa dalam diri peserta didik.
3. Sebagai sarana refleksi bagi guru dalam memperbaiki proses pembelajaran PPKn dalam rangka penguatan nilai-nilai kebhinnekaan terhadap peserta didik.
4. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan tambahan serta memperkaya hasana ilmu pendidikan khususnya pendidikan kewarganegaraan bagi guru dan siswa.

### **G. Ruang Lingkup Penelitian**

#### **1. Ruang Lingkup Ilmu**

Penelitian ini berada dalam lingkup ilmu pendidikan khususnya dalam wilayah kajian pendidikan pancasila dan kewarganegaraan (PPKn) dengan kontribusinya untuk membentuk warga Negara yang memiliki ciri khas nilai-nilai kebhinnekaan

serta mampu menggali, menguatkan dan melestarikan nilai-nilai kebhinnekaan sebagai ciri khas bangsa.

## **2. Subjek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini adalah peran guru PPKn dalam upaya penguatan nilai-nilai kebhinnekaan di SMP Negeri 1 Padangratu Lampung Tengah tahun pelajaran 2017/2018.

## **3. Objek Penelitian**

Objek dalam penelitian ini adalah perilaku yang menunjukkan nilai-nilai kebhinnekaan dalam diri peserta didik di SMP Negeri 1 Padangratu Lampung Tengah tahun pelajaran 2017/2018.

## **4. Wilayah Penelitian**

Ruang lingkup wilayah dalam penelitian ini adalah SMP Negeri 1 Padangratu Lampung Tengah tahun pelajaran 2017/2018.

## **5. Waktu Penelitian**

Waktu pelaksanaan penelitian ini adalah sejak dikeluarkannya Surat Izin Penelitian Pendahuluan No: 107/UN26.13/PN.01.00/2018 oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dimulai pada 7 Januari 2018 sampai selesainya penelitian ini pada 28 April 2018.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Deskripsi Teori

#### 1. Pengertian Peran

Menurut Soerjono Soekanto (2002:243), “peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan”. Dari hal diatas dapat kita lihat lebih lanjut bahwa pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peran normatif. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban dinas perhubungan dalam penegakkan hukum mempunyai arti penegakkan hukum secara total enforcment, yaitu penegakkan hukum secara penuh, Soekanto (1978: 220). Sedangkan peran ideal, dapat diterjemahkan sebagai peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut. Misalnya dinas perhubungan sebagai suatu organisasi formal tertentu diharapkan berfungsi dalam penegakkan hukum dapat bertindak sebagai pengayom bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan yang mempunyai tujuan akhir kesejahteraan masyarakat, artinya peranan yang nyata. Sedangkan peran ideal, dapat diterjemahkan sebagai peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut. Misalnya dinas perhubungan sebagai suatu organisasi diharapkan berfungsi dalam

penegakan hukum dapat bertindak sebagai pengayom bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan yang mempunyai tujuan akhir kesejahteraan masyarakat, artinya peranan yang nyata, (Soerjono Soekamto). Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi.

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan / diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial, syarat-syarat peran mencakup 3 (tiga) hal, yaitu : Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan. Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas ada baiknya terlebih dahulu kita pahami tentang peran, Miftah Thoha (1997).

Peran berarti laku, bertindak. Didalam kamus besar bahasa Indonesia peran ialah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat, E.St. Harahap, dkk (2007: 854) Sedangkan makna peran yang dijelaskan dalam Status, Kedudukan dan Peran dalam masyarakat, dapat dijelaskan melalui beberapa cara, yaitu pertama penjelasan historis.

Kedua, pengertian peran menurut ilmu sosial. Peran dalam ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut. Dalam pengertian sederhana, guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Guru dalam pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidikan ditempat-tempat tertentu, tidak mesti lembaga pendidikan formal, tetapi juga bisa di mesjid, surau/mushola, dirumah, dan sebagainya, Syiful Bahri Djamarah (1997:31).

Berdasarkan beberapa pengertian sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa peran merupakan suatu perangkat tingkah laku atau tindakan seseorang dalam memberikan berbagai macam ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Seseorang menjalankan peranan apabila ia melaksanakan hak

dalam menjalankan perannya. Ada beberapa faktor yang menentukan kurang berhasilnya suatu peranan. Dalam ilmu sosial ketidak berhasilan ini terwujud dalam kegagalan peran, kegagalan peran terjadi ketika seseorang enggan atau tidak melanjutkan peran individu yang harus dimainkannya.

## **2. Peran Guru PPKn**

Guru adalah pendidik yang berada di lingkungan sekolah. Dalam pengertian sederhana, guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Guru dalam pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidikan ditempat-tempat tertentu, tidak mesti lembaga pendidikan formal, tetapi juga bisa dimesjid, surau/mushola, dirumah, dan sebagainya, Syiful Bahri Djamarah (1997:31). UU No 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen menyebut guru adalah: “pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah”.

Tugas guru selain dari memberikan ilmu pengetahuan juga memberikan pendidikan dalam bidang moral pada anak didik sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang diatas. Masyarakat akan melihat bagaimana sikap perbuatan guru sehari-hari, apakah ada yang patut diteladani atau tidak, apakah dapat dijadikan panutan atau tidak. Bagaimana guru meningkatkan pelayanannya, memberikan dorongan dan arahan pada anak didiknya, dan bagaimana cara guru berpakaian, berbicara, serta bergaul

dengan siswanya, ataupun teman-temannya dalam kehidupan bermasyarakat, sering menjadi perhatian masyarakat luas. Guru merupakan unsur aparatur Negara dan abdi Negara. Karena itu guru perlu mengetahui kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan, sehingga dapat melaksanakan ketentuan kebijakan pemerintah tersebut. Untuk itu, semuanya diatur dalam kode etik guru Indonesia. Dengan demikian guru diharapkan untuk mampu berbakti kepada Negara sebagai suatu profesi kependidikan yang mulia.

Guru yang berbakti adalah guru yang mampu membentuk peserta didik berjiwa Pancasila. Dasar ini mengandung beberapa prinsip yang harus dipahami seorang guru dalam menjalankan tugasnya yakni tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional dapat dibaca dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional, yakni membentuk manusia seutuhnya yang berjiwa Pancasila, Selain mengajarkan pengetahuan dan perkembangan intelektual, guru juga harus memperhatikan perkembangan moral, jasmani rohani dan lain-lain yang sesuai dengan hakikat pendidikan. Hakikat pendidikan dalam hal ini yaitu usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan/ keahlian dalam kesatuan organis harmonis dinamis, didalam dan diluar sekolah yang berlangsung seumur hidup,. Andriani Purwastuti dkk (2002: 76).

Tujuan PPKn adalah agar peserta didik memiliki kemampuan:

1. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.
2. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti-korupsi.
3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya.
4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Fungsi PPKn adalah wahana untuk membentuk warga negara cerdas, terampil, dan berkarakter yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945.

Sedangkan kompetensi guru PPKn yang bersifat khusus: (Permendiknas No. 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru) meliputi:

1. Memahami materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran PPKn.
2. Memahami substansi PPKn yang meliputi pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), nilai dan sikap kewarganegaraan (*civic disposition*), dan ketrampilan kewarganegaraan (*civic skills*).

3. Menunjukkan manfaat mata pelajaran PPKn. Keunikan PPKn digambarkan John Potter, dalam *Citizenship Education* substansinya berisikan tentang hak – hak kita, tetapi harus diakui memiliki tiga keunikan yang membedakannya dengan mata pelajaran lain, (*Linked with other subject*), maksudnya sekolah harus mendukung secara eksplisit untuk mengkaitkan PPKn dengan mata pelajaran yang lain, (*A way of life*), maksudnya PPKn harus mengakar dalam pandangan hidup dan etos sekolah secara keseluruhan dan (*Participation*), maksudnya PPKn memerlukan generasi muda (*young people*) untuk belajar melalui partisipasi dan pengalaman nyata.

Komponen substansi PPKn meliputi: pengetahuan kewarganegaraan, ketrampilan kewarganegaraan dan karakter kewarganegaraan. Dengan demikian PPKn telah memiliki kawasan pembelajaran sendiri yang khas. Hal ini disebabkan dalam Taksonomi Bloom, Karakter merupakan aspek afektif, padahal karakter tidak hanya memiliki dimensi sikap tetapi juga perilaku/tindakan yang telah menjadi watak/perilaku sehari-hari. Begitu pula ketrampilan kewarganegaraan yang pada intinya merupakan ketrampilan partisipasi /ketrampilan sosial termasuk di dalamnya ketrampilan intelektual yang terdapat dalam Taksonomi Bloom. Hal inilah yang merupakan latar belakang mengapa PPKn harus memiliki kawasan pembelajaran yang merupakan komponen substansi PPKn.

### **3. Nilai-Nilai Kebhinnekaan**

Menurut Setyani (2009:8), semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang tertulis di pita berwarna dasar putih yang dicengkram oleh cakar Burung Garuda Pancasila adalah semboyan yang berasal dari bahasa Jawa kuno. Perkataan Bhinneka itu adalah gabungan dua perkataan, yakni Bhinna dan Ika. Kalimat itu seluruhnya dapat disalin “keragaman dalam persatuan dan

persatuan dalam keragaman”. Frase ini sangat dalam maknanya karena menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kalimat itu telah tua dan pernah dipakai oleh pujangga ternama Empu Tantular dalam buku Sutasoma dan negarawan Prabu Hayam Wuruk serta patih Gajah Mada di zaman peradaban Majapahit pada abad XIV. Untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, baik warga maupun pemimpin harus dapat menjadikannya sebagai landasan visional yang terintegrasi dalam menyelenggarakan kehidupan nasional yang sinergis, Supardan (2008). Dalam masyarakat Indonesia yang multikultural-integral, konsepsi aspirasinya terkandung dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Maknanya adalah menghubungkan daerah-daerah dan suku bangsa yang berbeda-beda dalam satu wadah yang disebut nusantara.

Istilah “Bhinneka Tunggal Ika” dipetik dari Kitab Sutasoma karya Mpu Tantular semasa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Istilah tersebut tercantum dalam bait 5 pupuh 139. Bait ini secara lengkap seperti di bawah ini:

*Rwāneka dhātu winuwus Buddha Wiswa,  
Bhinnêki rakwa ring apan kena parwanosen,  
Mangka ng Jinatwa kalawan Śiwatatwa tunggal,  
Bhinnêka tunggal ika tan hana dharma mangrwa.*

Terjemahan:

Konon Buddha dan Siwa merupakan dua zat yang berbeda. Mereka memang berbeda, tetapi bagaimanakah bisa dikenali? Sebab kebenaran Jina (Buddha) dan Siwa adalah tunggal. Terpecah belahlah itu, tetapi satu jualah itu.

Tidak ada kerancuan dalam kebenaran. Kitab Sutasoma mengajarkan toleransi kehidupan beragama, yang menempatkan agama Hindu dan agama Buddha hidup bersama dengan rukun dan damai. Kedua agama itu hidup beriringan di bawah payung kerajaan, pada jaman pemerintahan raja Hayam Wuruk. Meskipun agama Hindu dan Buddha merupakan dua substansi yang berbeda, namun perbedaan itu tidak menimbulkan perpecahan, karena kebenaran Hindu dan Buddha bermuara pada hal “Satu”. Hindu dan Buddha memang berbeda, tetapi sesungguhnya satu jenis, tidak ada perbedaan dalam kebenaran. Istilah “Bhinneka Tunggal Ika” yang semula menunjukkan semangat toleransi keagamaan, kemudian diangkat menjadi semboyan bangsa Indonesia. Sebagai semboyan bangsa konteks permasalahannya bukan hanya menyangkut toleransi beragama tetapi jauh lebih luas seperti yang umum disebut dengan istilah suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Pada tahun 1951, sekitar 600 tahun setelah pertama kali semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang diungkap oleh Empu Tantular, ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai semboyan resmi negara Republik Indonesia dengan Peraturan Pemerintah No.66 tahun 1951. Peraturan Pemerintah tersebut menentukan bahwa sejak 17 Agustus 1950, Bhinneka Tunggal Ika ditetapkan sebagai semboyan yang terdapat dalam Lambang Negara Republik Indonesia yaitu Garuda Pancasila. Kata bhinna ika, kemudian dirangkai menjadi satu kata bhinneka. Pada perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang kedua, Bhinneka Tunggal Ika dikukuhkan sebagai semboyan resmi yang terdapat dalam Lambang Negara, dan tercantum dalam pasal

36A UUD NRI Tahun 1945. Baru setelah diadakan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam pasal 36A menyebutkan : “Lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika”. Dengan demikian Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan yang merupakan kesepakatan bangsa, yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasarnya.

Oleh karena itu untuk dapat dijadikan acuan secara tepat dalam hidup berbangsa dan bernegara, makna Bhinneka Tunggal Ika perlu dipahami secara tepat dan benar untuk selanjutnya difahami bagaimana cara untuk mengimplementasikan secara tepat dan benar pula. Bhinneka Tunggal Ika tidak dapat dipisahkan dari hari kemerdekaan bangsa Indonesia, dan dasar negara Pancasila. Hal ini sesuai dengan komponen yang terdapat dalam Lambang Negara Indonesia.

Menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 1951 disebutkan :

Lambang Negara terdiri atas tiga bagian, yaitu:

1. Burung Garuda yang menengok dengan kepalanya lurus ke sebelah kanannya;
2. Perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan
3. Semboyan yang ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda. Di atas pita tertulis dengan huruf Latin sebuah semboyan dalam bahasa Jawa Kuno yang berbunyi : Bhinneka Tunggal Ika.

### **a. Sejarah Lahirnya Lambang Negara Indonesia**

Lambang Negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lambang Negara Indonesia berbentuk burung garuda yang kepalanya menoleh ke sebelah kanan (dari sudut pandang garuda), perisai berbentuk menyerupai jantung yang di gantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti "Berbeda-beda tetapi tetap satu" ditulis diatas pita yang dicengkeram oleh Garuda. Lambang ini dirancang oleh Sultan Hamid II dari Pontianak yang kemudian disempurnakan oleh Presiden Soekarno, dan diresmikan pemakaiannya sebagai lambang negara pertama kali pada Sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat Tanggal 11 Februari 1950.

Lambang negara Garuda Pancasila diatur penggunaannya dalam Peraturan Pemerintah No. 43/1958. Garuda muncul dalam berbagai kisah terutama di daerah Jawa dan Bali. Dalam berberapa kisah, Garuda menggambarkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan dan disiplin. Sebagai kendaraan Wishnu, Garuda juga memiliki sifat Wishnu sebagai pemelihara dan penjaga tatanan alam semesta. Dalam tradisi Bali, Garuda sangat dimuliakan, sebagai raja agung para burung. Di Bali ia biasanya digambarkan sebagai makhluk yang memiliki kepala, paruh, sayap dan cakar elang, tetapi memiliki tubuh dan lengan manusia. Biasanya digambarkan dalam ukiran yang halus dan rumit dengan warna cerah keemasan. Posisi mulia Garuda menurut tradisi Indonesia sejak jaman dahulu inilah yang menjadikannya sebagai simbol nasional Indonesia,

sebagai perwujudan ideologi pancasila. Tidak hanya itu, Garuda juga dipilih sebagai nama maskapai penerbangan nasional Indonesia Setelah perang kemerdekaan Indonesia tahun 1945-1949, disusul dengan pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda melalui Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949, dirasakan perlunya Indonesia (yang pada saat itu Republik Indonesia Serikat) untuk memiliki lambang negara. Lalu pada tanggal 10 Januari 1950 dibentuklah Panitia Teknis dengan nama Panitia Lencana Negara di bawah kordinator Menteri Negara Zonder Porto Folio Sultan Hamid II dengan susunan panitia teknis Muhammad Yamin sebagai ketua, Ki Hajar Dewantara, M.A. Pellaupessy, Moh. Natsir, dan RM.Ng. Poer Batjaraka sebagai anggota. Panitia ini bertugas menyeleksi usulan rancangan lambang negara untuk dipilih dan diajukan kepada Pemerintah. Merujuk keterangan Bung Hatta dalam bukunya yang berjudul "Bung Hatta Menjawab" untuk melaksanakan Keputusan Sidang Kabinet tersebut Menteri Priyono melaksanakan sayembara. Terpilihlah dua rancangan lambang negara yang terbaik, yaitu karya Sultan Hamid II sedangkan karya M. Yamin ditolak karena menyertakan sinar matahari, ini menggambarkan pengaruh Jepang didalamnya. Setelah rancangan terpilih, dialah intensif antara Sultan Hamid II, Presiden RIS (Soekarno) dan Perdana Menteri Mohammad Hatta, terus dilakukan untuk keperluan penyempurnaan rancangan tersebut. Mereka bertiga sepakat mengganti pita yang dicengkeram Garuda yang semula adalah pita merah putih, menjadi putih semua dengan menambahkan semboyan "Bhineka Tunggal Ika." Pada tanggal 8 Februari 1950, rancangan lambang negara yang dibuat Menteri

Negara RIS, Sultan Hamid II, diajukan kepada presiden Soekarno. Rancangan lambang negara tersebut mendapat masukan dari Partai Masyumi untuk dipertimbangkan kembali, karena adanya keberatan terhadap adanya gambar burung Garuda dengan tangan dan bahu manusia yang memegang perisai. Ini dianggap terlalu bersifat mitologis. Lalu Sultan Hamid II pun kembali mengajukan rancangan gambar lambang negara yang telah disempurnakan, sehingga tercipta bentuk Rajawali Garuda Pancasila. Disingkat Garuda Pancasila.

Presiden Soekarno kemudian menyerahkan rancangan tersebut kepada Kabinet RIS melalui Moh. Hatta sebagai perdana menteri pada saat itu. Dalam bukunya berjudul "Sekitar Pancasila" yang diterbitkan oleh Departemen Pertahanan dan Keamanan, Pusat Sejarah ABRI, AG. Pringgodigdo menyebutkan bahwa rancangan lambang negara karya Sultan Hamid II akhirnya diresmikan pemakaiannya dalam Sidang Kabinet RIS pada tanggal 11 Februari 1950. Ketika itu gambar bentuk kepala rajawali garuda pancasila masih gundul dan tidak berjambul seperti bentuk sekarang ini. Presiden Soekarno kemudian memperkenalkan untuk pertama kalinya lambang negara itu kepada khalayak umum pada tanggal 15 Februari 1950. Pada tanggal 20 Maret 1950, Presiden Soekarno memerintahkan seorang pelukis istana bernama Dullah untuk melukis kembali rancangan tersebut, setelah sebelumnya juga telah diperbaiki dengan menambahkan jambul pada kepala Sang Garuda Pancasila, serta mengubah posisi cakar kaki yang mencengkeram pita dari semula di belakang pita menjadi di depan pita, atas masukan Presiden Soekarno. Dipercaya bahwa alasan Soekarno

menambahkan jambul karena kepala Garuda yang gundul terlalu mirip dengan *Bald Eagle*, lambang Negara Amerika Serikat. Dan untuk terakhir kalinya, Sultan Hamid II menyelesaikan penyempurnaan bentuk final gambar lambang negara, yaitu dengan menambahkan skala ukuran dan tata warna gambar lambang negara tersebut. Rancangan Garuda Pancasila terakhir ini dibuatkan patung besar dari bahan perunggu berlapis emas yang disimpan dalam ruangan Kemerdekaan Monumen Nasional sebagai lambang negara RI dan desainnya tidak berubah hingga kini.

#### **b. Makna Lambang Negara Indonesia**

Garuda Pancasila merupakan burung yang sudah dikenal melalui mitologi kuno di sejarah Nusantara (Indonesia), yaitu tunggangan Dewa Wisnu yang berwujud seperti burung elang rajawali. Garuda dipakai sebagai Simbol Negara untuk menggambarkan Negara Indonesia merupakan bangsa yang kuat dan besar. Warna keemasan di burung Garuda menggambarkan kejayaan dan keagungan, Garuda memiliki sayap, paruh, cakar dan ekor yang melambangkan tenaga dan kekuatan pembangunan, Jumlah bulu Garuda Pancasila menggambarkan hari / Tanggal proklamasi kemerdekaan Bangsa Indonesia, yaitu tanggal 17-Agustus-1945, antara lain: Jumlah bulu pada masing-masing sayap berjumlah 17, Jumlah bulu pada ekor berjumlah 8, Jumlah bulu di bawah perisai / pangkal ekor berjumlah 19, Jumlah bulu di leher berjumlah 45. Perisai merupakan tameng yang telah lama dikenal dalam budaya dan peradaban Nusantara sebagai senjata yang

melambangkan perlindungan, pertahanan dan perjuangan diri untuk mencapai tujuan. Di tengah perisai terdapat sebuah garis hitam tebal yang menggambarkan garis khatulistiwa hal tersebut mencerminkan lokasi / Letak Indonesia, yaitu Indonesia sebagai negara tropis yang dilintasi garis khatulistiwa. Pada perisai terdapat lima buah ruang yang mewujudkan dasar negara Pancasila. Warna dasar pada ruang perisai merupakan warna bendera Indonesia (merah putih). dan pada bagian tengahnya memiliki warna dasar hitam.

Makna Sila 1, Ketuhanan Yang Maha Esa dilambangkan dengan Perisai hitam dengan sebuah bintang emas berkepala lima menggambarkan agama-agama besar di Indonesia, Islam, Buddha, Hindu, Kristen, dan juga Katolik.

Makna Sila 2, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dilambangkan Rantai yang disusun atas gelang-gelang kecil ini menandakan hubungan manusia satu sama lain yang saling membantu, gelang yang persegi menggambarkan pria sedangkan gelang yang lingkaran menggambarkan wanita.

Makna Sila 3, Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin (*Ficus benjamina*) di bagian kiri atas perisai berlatar putih, Pohon beringin merupakan sebuah pohon Indonesia yang berakar tunjang - sebuah akar tunggal panjang yang menunjang pohon yang besar ini dengan tumbuh sangat dalam ke dalam tanah. Hal ini mencerminkan kesatuan dan persatuan Indonesia. Pohon Beringin juga mempunyai banyak akar yang menggelayut dari ranting-rantingnya. ini mencerminkan Indonesia

sebagai negara kesatuan namun memiliki berbagai latar belakang budaya yang berbeda-beda (bermacam-macam).

Makna Sila 4, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan. yang disimbolkan dengan kepala banteng pada bagian kanan atas perisai berlatar merah. Lembu liar atau Banteng merupakan binatang sosial, sama halnya dengan manusia cetusan Bung Karno dimana pengambilan keputusan yang dilakukan secara musyawarah, kekeluargaan dan gotong royong merupakan nilai-nilai yang menjadi ciri bangsa Indonesia.

Makna Sila 5, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dilambangkan dengan padi dan kapas di bagian kanan bawah perisai yang berlatar putih. kapas dan padi (mencerminkan pangan dan sandang) merupakan kebutuhan pokok semua masyarakat Indonesia tanpa melihat status maupun kedudukannya. ini mencerminkan persamaan sosial dimana tidak adanya kesenjangan sosial antara satu dan yang lainnya, tapi hal ini (persamaan sosial) bukan berarti bahwa Indonesia memakai ideologi komunisme.

Pita yang bertulis semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" Sehelai pita putih dengan tulisan "Bhinneka Tunggal Ika" berwarna hitam dicengkeram oleh Kedua cakar Garuda Pancasila. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika merupakan kutipan dari Kakawin Sutasoma karya Mpu Tantular. Kata "bhinneka" memiliki arti beraneka ragam atau berbeda beda, sedang kata "tunggal" berarti satu, dan kata "ika" bermakna itu. Secara harfiah Bhinneka Tunggal Ika diartikan "Beraneka Satu Itu", yang bermakna meskipun

berbeda beda tapi pada hakikatnya tetap satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk melambangkan kesatuan dan persatuan Bangsa Indonesia yang terdiri dari beraneka ragam ras, budaya, bahasa daerah, agama, suku bangsa dan kepercayaan.

#### Letak Warna Pada Bagian-bagian Garuda Pancasila

- a. Warna yang digunakan dalam lambang Garuda Pancasila tidak boleh diletakkan asal asalan karena warna warna itu telah ditentukan untuk diletakkan pada bagian-bagian yang ada pada lambang Garuda Pancasila.
- b. Warna hitam menjadi warna kepala banteng yang terdapat di lambang Garuda Pancasila. Warna hitam digunakan juga untuk warna perisai tengah latar belakang bintang, juga untuk mewarnai garis datar tengah perisai. dan Warna hitam juga dipakai sebagai warna tulisan untuk semboyan "Bhinneka Tunggal Ika".
- c. Warna merah digunakan untuk warna perisai kiri atas dan kanan bawah yang terdapat pada lambang Garuda Pancasila.
- d. Warna hijau digunakan sebagai warna pohon beringin.
- e. Warna putih dipakai untuk warna perisai kiri bawah dan kanan atas. Warna putih juga diberi pada Pita yang dicengkeram oleh Burung Garuda Pancasila.
- f. Sedangkan Warna kuning diletakkan sebagai warna Garuda Pancasila, untuk warna bintang, rantai, kapas, dan padi. Makna

Warna pada Garuda Pancasila Ada beberapa warna yang terdapat pada Lambang Garuda Pancasila.

Warna-warna yang dipakai menjadi warna pada lambang Garuda Pancasila ini memiliki makna dan arti sebagai berikut :

- a. Warna putih memiliki arti kesucian, kebenaran, dan kemurnian.
- b. warna hitam memiliki makna keabadian.
- c. Warna merah memiliki artian keberanian.
- d. Warna hijau artinya adalah kesuburan dan kemakmuran.
- e. Warna kuning berarti kebesaran, kemegahan, dan keluhuran.

### **c. Makna dan Konsep Bhinneka Tunggal Ika**

Jika dianalisis, semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” yang berasal dari bahasa Sanskerta itu terdiri dari kata “Bhinneka”, “Tunggal”, dan “Ika”. Kata “Bhinneka” berasal dari kata “Bhinna” dan “Ika”. “Bhinna” artinya berbeda-beda dan “Ika” artinya itu. Jadi, kata “Bhinneka” berarti “yang berbeda-beda itu”. Analisa lain menunjukkan bahwa kata “bhinneka” terdiri dari unsur kata “bhinn-a-eka”. Unsur “a” artinya tidak, dan “eka” artinya satu. Jadi, kata “bhinneka” juga dapat berarti “yang tidak satu”. Sedangkan kata “Tunggal” artinya satu, dan “Ika” artinya itu. Berdasarkan analisa tersebut dapat disimpulkan bahwa semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” berarti “yang berbeda-beda itu dalam yang satu itu” atau “beranekaragam namun satu jua”.

Semboyan Bhinneka Tunggal Ika hampir sama artinya dengan semboyan negara Amerika Serikat. Semboyan bangsa Amerika Serikat yang maknanya *diversity in unity*, perbedaan dalam kesatuan. Semboyan tersebut terungkap di abad ke XVIII, sekitar empat abad setelah Empu Tantular mengemukakan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sangat mungkin tidak ada hubungannya, namun yang jelas konsep keanekaragaman dalam kesatuan telah diungkap oleh Empu Tantular lebih dahulu. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan karya Empu Tantular, diharapkan dapat dijadikan acuan bagi rakyat Majapahit dalam berdharma, oleh bangsa Indonesia setelah menyatakan kemerdekaannya, dijadikan semboyan dan pegangan bangsa dalam membawa diri dalam hidup berbangsa dan bernegara.

Kebhinnekaan atau yang berbeda-beda itu menunjuk pada realitas objektif masyarakat Indonesia yang memiliki keanekaragaman yang tinggi.

Keanekaragaman masyarakat Indonesia dapat ditemukan dalam berbagai bidang kehidupan. Keanekaragaman di bidang politik diwarnai oleh adanya kepentingan yang berbeda-beda antara individu atau kelompok yang satu dengan individu atau kelompok yang lainnya. Di bidang ekonomi, keanekaragaman dapat dilihat dari adanya perbedaan kebutuhan hidup, yang akhirnya berimplikasi terhadap munculnya keanekaragaman pada pola produksi. Di bidang sosial, keberagaman itu tercermin dari adanya perbedaan peran dan status sosial. Selain itu, keanekaragaman juga dapat dilihat dari segi geografis, budaya, agama, etnis, dan sebagainya. Keanekaragaman itu pun masih dikukuhkan lagi oleh kebhinnekaan perseorangan masing-masing anak negeri yang kini berjumlah lebih dari 200 juta jiwa.

Dengan adanya keanekaragaman dalam berbagai bidang tersebut menyebabkan Indonesia dijuluki sebagai masyarakat yang multi etnik, multi agama (*multi religi*), multi budaya (*multikultural*), dan sebagainya. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk (*Plural Society*).

Makna kesatuan (tunggal ika) dalam Bhinneka Tunggal Ika merupakan cerminan rasionalitas yang lebih menekankan kesamaan daripada perbedaan. Kesatuan merupakan sebuah gambaran ideal. Dikatakan ideal karena kesatuan merupakan suatu harapan atau cita-cita untuk mengangkat atau menempatkan unsur perbedaan yang terkandung dalam keanekaragaman bangsa Indonesia ke dalam suatu wadah, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesatuan adalah upaya untuk menciptakan wadah yang mampu menyatukan perbedaan atau keanekaragaman.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa Bhinneka Tunggal Ika merupakan pernyataan jiwa dan semangat bangsa Indonesia yang mengakui realitas bangsa yang majemuk, namun tetap menjunjung tinggi kesatuan. Bhinneka Tunggal Ika merumuskan dengan tegas adanya harmoni antara kebhinnekaan dan ketunggalikaan, antara keanekaan dan keekaan, antara keragaman dan kesatuan, antara hal banyak dan hal satu, atau antara pluralisme dan monisme.

Menurut Rizal Mustansyir, (2009:52) "Bhinneka Tunggal Ika adalah cerminan keseimbangan antara unsur perbedaan yang menjadi ciri keanekaan dengan unsur kesamaan yang menjadi ciri kesatuan".

Keseimbangan itu sendiri merupakan konsep filsafati yang selalu terletak

pada ketegangan di antara dua titik ekstrim, yaitu keanekaan mutlak di satu pihak dan kesatuan mutlak di pihak lain. Setiap kali segi keanekaan yang menonjolkan perbedaan itu memuncak akan membawa kemungkinan munculnya konflik, maka kesatuanlah yang akan meredakan atas dasar kesadaran nasional. Demikian pula sebaliknya, manakala segi kesatuan yang menonjolkan kesamaan itu tampil secara berlebihan, maka keanekaan selalu mengingatkan bahwa perbedaan adalah kodrat sekaligus berkah yang tak terelakkan.

Semboyan Bhinneka Tunggal Ika merupakan pernyataan yang mengakui realitas bangsa Indonesia yang majemuk (berbhinneka), namun selalu mencita-citakan terwujudnya kesatuan (ketunggal-ikaan). Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika berarti Indonesia selain mengakui adanya keberagaman atau perbedaan juga mengakui adanya kesatuan dan tetap berkeinginan untuk menjadi satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia.

Kebhinnekaan merupakan ciri dasar bangsa Indonesia sejak Republik ini dibentuk, kemudian diproklamasikan oleh para pendiri negara (*the founding fathers*) pada paruh kedua abad silam hingga kini. Sebagai suatu realitas objektif, maka kebhinnekaan telah menjadi identitas bangsa Indonesia.

Karena itu, upaya-upaya untuk meniadakan keberagaman atau upaya penyeragaman merupakan tindakan yang menentang kenyataan. Kalau keberagaman itu tidak boleh ada di Indonesia, berarti identitas bangsa tidak ada lagi. Untuk menjaga keberlangsungan hidup berbangsa, kebhinnekaan sebaiknya tidak dipandang sebagai ancaman, tetapi kebhinnekaan harus dipandang sebagai aset yang diharapkan mampu berperan sebagai sumber

kekayaan bagi bangsa Indonesia. Kesadaran sebagai masyarakat yang berbhinneka tetapi mencita-citakan kesatuan yang dikukuhkan sebagai konsensus bersama dalam Soempah Pemuda 1928 telah menjadi modal sosial ampuh yang berhasil mempersatukan dan mengantar negara-bangsa ini mampu melewati masa-masa sulit dari dulu sampai sekarang, bahkan juga nanti.

Kadang-kadang kita kurang menyadari bahwa kehidupan ini juga merupakan sinergi dari kekuatan yang berbeda. Bahkan perbedaan itu sering ditempatkan pada posisi yang berlawanan dan kontradiktif, seperti atas dan bawah, kiri dan kanan, positif dan negatif, kaya dan miskin, laki-laki dan perempuan, dan sebagainya. Dalam rancangan integrasi, perbedaan itu tidak dipandang sebagai sesuatu yang berlawanan, melainkan sebagai sesuatu yang berpasangan. Keindahan justru tercipta bila terdapat perbedaan-perbedaan antara bagian bagiannya yang dipersatukan dalam bingkai kesatuan. Masyarakat yang berbhinneka yang dicirikan oleh adanya perbedaan memang sangat rawan terhadap konflik. Indonesia sebagai masyarakat berbhinneka, secara internal telah mengandung sumber-sumber ketegangan dan pertentangan. Menurut Eka Dharmaputera (2007 : 40) ”baik keanekaragaman maupun kesatuan Indonesia adalah kenyataan sekaligus persoalan”. Kebhinnekaan Indonesia sepintas lalu memang jauh lebih menonjol daripada kesatuannya. Oleh karena itu, bahaya disintegrasi selalu merupakan ancaman baik riil maupun potensial. Jika bertumpu pada realitas bangsa yang berbhinneka, bahaya disintegrasi memang merupakan ancaman yang amat nyata. Namun karena Indonesia tidak hanya berbhinneka, tetapi

juga tunggal ika, maka integrasi bukanlah sesuatu yang mustahil untuk dipertahankan di Indonesia. Perbedaan dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia merupakan suatu kenyataan. Karena itu janganlah membedakan kenyataan yang memang sudah berbeda. Membedakan sesuatu yang berbeda hanya akan menimbulkan bahaya disintegrasi. Perbedaan dalam kebhinnekaan perlu disinergikan atau dikelola dengan cara mendayagunakan aneka perbedaan menjadi modal sosial untuk membangun kebersamaan. Untuk itu diperlukan adanya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk melihat kesamaan pada sesuatu yang berbeda.

#### **d. Prinsip-Prinsip yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika**

Prinsip Bhinneka Tunggal Ika menurut Winarno, (2013:11) adalah "kesediaan warga bangsa untuk bersatu dalam perbedaan. Yang disebut bersatu dalam perbedaan adalah kesediaan warga bangsa untuk setia pada lembaga yang disebut negara dan pemerintahnya, tanpa menghilangkan keterikatannya pada suku bangsa, adat, ras, dan agamanya" Untuk dapat mengimplementasikan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dipandang perlu untuk memahami secara mendalam prinsip-prinsip yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika.

Prinsip-prinsip tersebut menurut Baidillah (2010:13) adalah sebagai berikut:

- a. Faham Bhinneka Tunggal Ika, yang oleh Ir Sujamto disebut sebagai faham Tantularisme, bukan faham sinkretisme, yang mencoba untuk mengembangkan konsep baru dari unsur asli dengan unsur yang datang dari luar.

- b. Bhinneka Tunggal Ika tidak bersifat sektarian dan eksklusif, Bhinneka Tunggal Ika bersifat inklusif. Golongan mayoritas dalam hidup berbangsa dan bernegara tidak memaksakan kehendaknya pada golongan minoritas.
- c. Bhinneka Tunggal Ika dilandasi oleh sikap saling percaya mempercayai, saling hormat menghormati, saling cinta mencintai dan rukun.
- d. Bhinneka Tunggal Ika bersifat konvergen tidak divergen, yang bermakna perbedaan yang terjadi dalam keanekaragaman tidak untuk dibesar-besarkan, tetapi dicari titik temu, dalam bentuk kesepakatan bersama. Hal ini akan terwujud apabila dilandasi oleh sikap toleran, non sektarian, inklusif, akomodatif, dan rukun.

Sifat terbuka yang terarah merupakan syarat bagi berkembangnya masyarakat modern. Sehingga keterbukaan dan berdiri sama tinggi serta duduk sama rendah, memungkinkan terbentuknya masyarakat yang pluralistik secara ko-eksistensi, saling hormat menghormati, tidak merasa dirinya yang paling benar dan tidak memaksakan kehendak yang menjadi keyakinannya kepada pihak lain. Segala peraturan perundang-undangan khususnya peraturan daerah harus mampu mengakomodasi masyarakat yang pluralistik dan multikultural, dengan tetap berpegang teguh pada dasar negara Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Suatu peraturan perundang-undangan, utamanya peraturan daerah yang memberi peluang terjadinya perpecahan bangsa, atau yang semata-mata untuk mengakomodasi kepentingan unsur bangsa harus dihindari. Suatu contoh persyaratan untuk jabatan daerah harus dari putra daerah, menggambarkan sempitnya kesadaran nasional yang semata-mata untuk memenuhi aspirasi kedaerahan, yang akan mengundang terjadinya perpecahan. Hal ini tidak mencerminkan penerapan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut secara konsisten akan terwujud masyarakat yang damai, aman, tertib, teratur, sehingga kesejahteraan dan keadilan akan terwujud.

### **e. Implementasi Bhinneka Tunggal Ika**

Setelah kita pahami beberapa prinsip yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika, maka langkah selanjutnya adalah bagaimana prinsip-prinsip Bhinneka Tunggal Ika ini diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

#### **a. Perilaku inklusif.**

Di depan telah dikemukakan bahwa salah satu prinsip yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika adalah sikap inklusif. Dalam kehidupan bersama yang menerapkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika memandang bahwa dirinya, baik itu sebagai individu atau kelompok masyarakat merasa dirinya hanya merupakan sebagian dari kesatuan dari masyarakat yang lebih luas. Betapa besar dan penting kelompoknya dalam kehidupan bersama, tidak memandang rendah dan menyepelkan kelompok yang lain. Masing-masing memiliki peran yang tidak dapat diabaikan, dan bermakna bagi kehidupan bersama.

#### **b. Mengakomodasi sifat pluralistik**

Bangsa Indonesia sangat pluralistik ditinjau dari keragaman agama yang dipeluk oleh masyarakat, aneka adat budaya yang berkembang di daerah, suku bangsa dengan bahasanya masing masing, dan menempati ribuan pulau yang tiada jarang terpisah demikian jauh pulau yang satu dari pulau yang lain. Tanpa memahami makna

pluralistik dan bagaimana cara mewujudkan persatuan dalam keanekaragaman secara tepat, dengan mudah terjadi disintegrasi bangsa. Sifat toleran, saling hormat menghormati, mendudukan masing-masing pihak sesuai dengan peran, harkat dan martabatnya secara tepat, tidak memandang remeh pada pihak lain, apalagi menghapus eksistensi kelompok dari kehidupan bersama, merupakan syarat bagi lestarynya negara-bangsa Indonesia.

c. Tidak mencari menangnya sendiri

Menghormati pendapat pihak lain, dengan tidak beranggapan bahwa pendapatnya sendiri yang paling benar, dirinya atau kelompoknya yang paling hebat perlu diatur dalam menerapkan Bhinneka Tunggal Ika. Dapat menerima dan memberi pendapat merupakan hal yang harus berkembang dalam kehidupan yang beragam. Perbedaan ini tidak untuk dibesar-besarkan, tetapi dicari titik temu. Bukan dikembangkan divergensi, tetapi yang harus diusahakan adalah terwujudnya konvergensi dari berbagai keanekaragaman. Untuk itu perlu dikembangkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

d. Musyawarah untuk mencapai mufakat

Dalam rangka membentuk kesatuan dalam keanekaragaman diterapkan pendekatan “musyawarah untuk mencapai mufakat”. Bukan pendapat sendiri yang harus dijadikan kesepakatan bersama, tetapi common denominator, yakni inti kesamaan yang dipilih sebagai kesepakatan bersama. Hal ini hanya akan tercapai dengan

proses musyawarah untuk mencapai mufakat. Dengan cara ini segala gagasan yang timbul diakomodasi dalam kesepakatan. Tidak ada yang menang tidak ada yang kalah. Inilah yang biasa disebut sebagai *win-win solution*.

e. Dilandasi rasa kasih sayang dan rela berkorban

Dalam menerapkan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu dilandasi oleh rasa kasih sayang. Saling curiga mencurigai harus dibuang jauh-jauh. Saling percaya mempercayai harus dikembangkan, iri hati, dengki harus dibuang dari kamus Bhinneka Tunggal Ika. Bila setiap warganegara memahami makna Bhinneka Tunggal Ika, meyakini akan ketepatannya bagi landasan kehidupan berbangsa dan bernegara, serta mau dan mampu mengimplementasikan secara tepat dan benar maka negara Indonesia pun akan tetap kokoh dan bersatu selamanya.

**f. Teori Multikulturalisme**

Horace Kallen : Kallen merupakan orang pertama yang mengkonstruksi teori pluralisme budaya. Menurutnya, jika berbagai kebudayaan yang beragam atau perbedaan yang bervariasi itu dibiarkan hidup dan berkembang dalam suatu bangsa, maka upaya ke arah persatuan Nasional telah dilakukan. Dalam teorinya, Kallen mengungkapkan bahwa setiap etnik dan kelompok budaya dalam suatu bangsa menjadi penting dan unik karena semua memberi kontribusi terhadap pengayaan kebudayaan.

Bill Martin: dalam karyanya *Multiculturalism: Consumerist Or Transformational?* Martin menuangkan gagasannya bahwa semua isu yang berkaitan dengan pengembangan multikulturalisme tumbuh dalam sebuah pertanyaan tentang perbedaan cara pandang, seperti yang dilakukan oleh para filsuf dan teoritikus sosial. Menurutnya, multikulturalisme merupakan agenda sosial politik, maka harus dimaknai lebih dari sekedar iklan dalam kelompok yang berbeda-beda. Semua haruslah mendekati dengan cara pandang yang sama yakni atas nama kemanusiaan.

## **B. Penelitian yang relevan**

### **a. Kajian lokal PPkn**

Di akses tanggal 1 Februari 2018, [digilib.unila.ac.id](http://digilib.unila.ac.id)., evi yunita sari, jurusan ilmu pendidikan sosial- Pkn, FKIP tahun 2016 universitas lampung, jurusan ilmu pendidikan sosial, judul : pengaruh pemahaman konsep bhinneka tunggal ika terhadap hubungan sosial siswa berbeda suku di SMP Negeri 21 Bandar Lampung tahun pelajaran 2015/2016. Hasil penelitian ini adalah ada pengaruh antara pemahaman konsep Bhinneka tunggal ika terhadap hubungan sosial siswa berbeda suku di SMP Negeri 21 Bandar Lampung tahun pelajaran 2015/2016.

### **b. kajian nasional PPkn**

Di akses tanggal 1 Februari 2018, [ejurnal.fkip.ums.ac.id](http://ejurnal.fkip.ums.ac.id), umi setyaningsih, jurusan ilmu pendidikan sosial-Pkn, FKIP tahun 2012 universitas muhammadiyah surakarta, judul : implementasi nilai-nilai bhinneka tunggal

ika pada siswa kelas VII SMP Negeri 1 Surakarta pada tahun pelajaran 2016/2017, menggunakan metode deskriptif kualitatif, hasil dari penelitian ini adalah implementasi nilai-nilai bhinneka tunggal ika pada siswa kelas VII SMP Negeri surakarta pada tahun pelajaran 2016/2017 sudah berjalan sebagai mana mestinya meski terdapat beberapa kendala.

c. kajian internasional civic education.

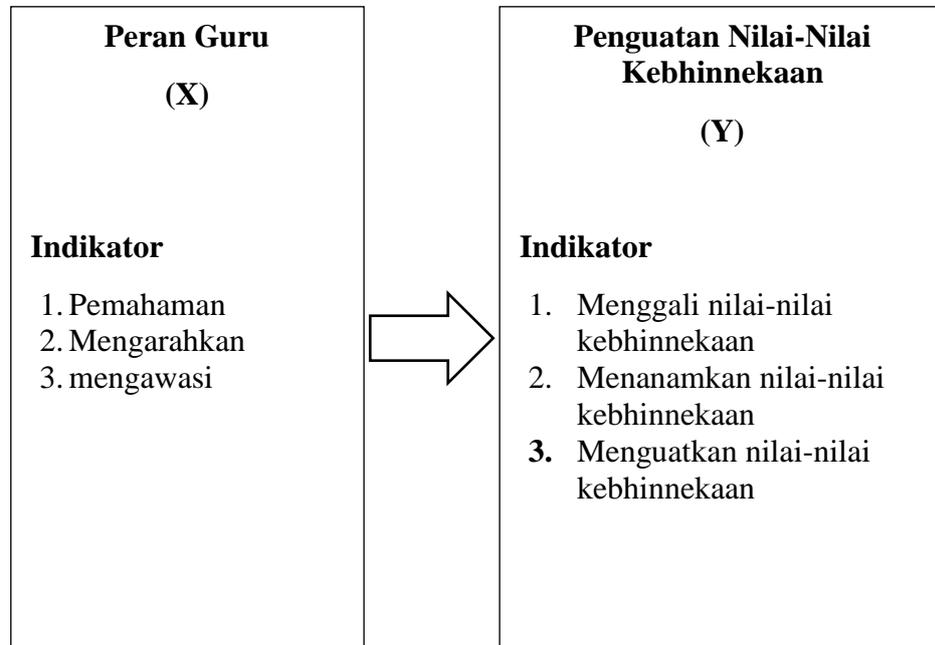
Di akses tanggal 1 Februari 2018, [www.sciencedirect.com](http://www.sciencedirect.com), marijke van bommel, han university of applied sciences. The netherland 2014, appreciation of a constructivist curriculum for learning theoretical knowledge by sosial work student with different kind and levels of learning motivation.

### **C. Kerangka Pikir**

Dapat saya simpulkan bahwa seorang guru mempunyai peran yang begitu banyak. Peran yang begitu banyak yang harus di laksanakan oleh guru hendaknya tidak menjadikan guru mundur dari tugas mulia mencerdaskan anak bangsa. Peran-peran tersebut harus menjadi tantangan dan dorongan bagi guru, bahwa didalam masyarakat harus ada yang menjalani peran guru.

Penguatan nilai-nilai kebhinnekaan sebagai pedoman dalam tata pergaulan untuk memelihara kerukunan, kesejahteraan dan keadilan didalam masyarakat, penanaman nilai-nilai kebhinnekaan menjadi aspek yang sangat penting dalam pembentukan.

Berdasarkan pemikiran yang telah dijelaskan sebelumnya, hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 bagan kerangka pikir penelitian.

### **III METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif karena dalam penelitian ini mendeskripsikan keadaan yang terjadi pada saat sekarang secara sistematis dan faktual yang menuntut untuk segera dicari jalan keluarnya. Menurut Whitney dalam Asep Saepul Hamdi (2014:5), "metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena". Menurut Noor (2017:38), "penelitian kuantitatif adalah metode untuk menguji teori-tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel. Variabel-variabel ini diukur (biasanya dengan instrumen penelitian) sehingga data yang terdiri dari angka-angka dapat dianalisis berdasarkan prosedur statistik".

Oleh sebab itu jenis penelitian ini tepat digunakan untuk menjelaskan Peran Guru PPKn Dalam Upaya Penguatan Nilai-Nilai Kebhinnekaan Di SMP Negeri 1 Padangratu Lampung Tengah Tahun Pelajaraan 2017/2018.

## B. Populasi dan Sampel

### 1. Populasi

Menurut Sugiyono (2008:117) “populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.

Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik SMP Negeri 1 Padangratu Lampung Tengah. lebih rinci lagi digambarkan oleh tabel berikut:

**Tabel 3.1. Data sampel peserta didik di SMP Negeri 1 Padangratu Lampung Tengah**

No	Kelas	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	VII	99	99	198
2.	VIII	89	89	178
3.	IX	86	93	179
Jumlah		274	281	555

*Sumber: Tata Usaha SMP Negeri 1 Padangratu Lampung Tengah 2017/2018.*

### 2. Sampel

Menurut Sugiyono (2008:118) “sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dengan maksud peneliti menggunakan sampel untuk memudahkan peneliti dalam pelaksanaan

penelitian. Sampel dapat diambil jika jumlah populasi besar dan peneliti tidak bisa mengambil semua responden dalam suatu penelitian. Oleh karena itu, sampel yang diambil dari populasi harus representatif”. Sedangkan untuk menentukan besar kecilnya sampel menurut Suharsimi Arikunto (2010:120) menyatakan “apabila subyek kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi, selanjutnya jika jumlah subyeknya lebih dari 100 dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih.

Jumlah peserta didik mencapai 555 orang, ini berarti jumlah peserta didik yang menjadi sampel di SMP Negeri 1 Padangratu adalah berjumlah 56 orang. Lebih rinci lagi digambarkan oleh tabel berikut:

**Tabel 3.2. Data sampel peserta didik di SMP Negeri 1 Padangratu**

No	Kelas	Jumlah	Sampel
1.	VII	198	$198 \times 10\% = 19.8 = 20$
2.	VIII	178	$178 \times 10\% = 17.8 = 18$
3.	IX	179	$179 \times 10\% = 17.9 = 18$
Jumlah		555	56

Berdasarkan jumlah total populasi yang ada di SMP Negeri 1 Padangratu Lampung Tengah, maka peneliti membatasi pengambilan sampel sebanyak 10% dari jumlah populasi total setiap kelas, sehingga diperoleh jumlah total sampel keseluruhan yaitu berjumlah 56 peserta didik.

### C. Variabel Penelitian

Penelitian ini penulis membedakan dua variabel yaitu variabel bebas sebagai variabel yang mempengaruhi (X) dan variabel terikat yang dipengaruhi (Y) yaitu :

1. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah peran guru PPKn.
2. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah penguatan nilai-nilai kebhinnekaan.

### D. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional

#### 1. Definisi Konseptual

- a. Peran adalah suatu perangkat tingkah laku atau tindakan seseorang dalam memberikan berbagai macam ilmu pengetahuan kepada individu maupun kelompok. Seseorang menjalankan peran apabila ia melaksanakan hak dan kewajibannya yang merupakan bagian tak terpisahkan dari status yang ada dalam dirinya.
- b. Peran guru PPKn adalah Memahami substansi PPKn yang meliputi pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), nilai dan sikap kewarganegaraan (*civic disposition*), dan ketrampilan kewarganegaraan (*civic skills*). Fungsi PPKn adalah wahana untuk membentuk warga negara cerdas, terampil, dan berkarakter yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945.
- c. Nilai-Nilai Kebhinnekaan adalah dilandasi oleh sikap saling percaya mempercayai, saling hormat menghormati, saling cinta mencintai dan

rukun. Bhinneka Tunggal Ika bersifat konvergen tidak divergen, yang bermakna perbedaan yang terjadi dalam keanekaragaman tidak untuk dibesar-besarkan, tetapi dicari titik temu, dalam bentuk kesepakatan bersama. Hal ini akan terwujud apabila dilandasi oleh sikap toleran, non sektarian, inklusif, akomodatif, dan rukun.

## 2. Definisi Operasional

Definisi Operasional variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peran yang begitu berat dipikul dipundak guru hendaknya tidak menjadikan guru mundur dari tugas mulia tersebut. Peran-peran tersebut harus menjadi tantangan dan motivasi bagi guru. Dia harus menyadari bahwa di masyarakat harus ada yang menjalani peran guru. Bila tidak, maka masyarakat tidak akan terbangun dengan utuh.

Diukur dengan menggunakan indikator:

- Berperan
- Kurang Berperan
- Tidak Berperan

2. Dalam hal ini dituntut untuk mengaktualisasikan dan mengekspresikan pencapaian tujuan ini sebagai hasil pembelajaran di kelas. Tingkat penguasaan yang dicapai oleh peserta didik dalam mengikuti program kegiatan pembelajaran sesuai dengan tujuan pendidikan yang ditetapkan. Tanggung jawab peserta didik dalam menanamkan nilai-nilai kebhinnekaan dalam diri sebagai jenis kemampuan yang diperoleh dari

belajar. Adapun indikator yang dapat dijadikan tolak ukur dalam sebuah kerja ketika ia mampu melakukan:

- Menggali nilai-nilai kebhinnekaan.
- Menanamkan nilai-nilai kebhinnekaan.
- Menguatkan nilai-nilai kebhinnekaan.

### **E. Rencana Pengukuran Variabel**

Variabel yang diukur dalam rencana penelitian ini adalah peran guru PPKn (X) dengan 3 indikator, berperan, kurang berperan, tidak berperan dengan menggunakan angket berdasarkan skor yang berskala 1-3 yaitu berperan, kurang berperan, dan tidak berperan, serta berhasil, kurang berhasil, tidak berhasil. Selanjutnya variabel (Y) tentang nilai-nilai kebhinnekaan dengan indikator adalah nilai kesatuan, nasionalis, tidak merasa egois, sikap saling percaya, kesepakatan bersama.

### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Tekni pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

#### **1. Teknik Pokok**

##### **a. Angket**

Dalam penelitian ini, angket menjadi teknik pokok dalam pengumpulan data penelitian, menurut Sugiyono (2014:199), “teknik angket atau kuisioner merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya”.

Dengan menggunakan angket tertutup, peneliti telah menyiapkan jawaban yang harus dipilih oleh Responden. Masing-masing mempunyai skor bobot yang bervariasi. Berikut ini skor untuk alternatif jawaban pada angket:

1. Alternatif jawaban a diberi skor 3
2. Alternatif jawaban a diberi skor 2
3. Alternatif jawaban a diberi skor 1

## **2. Teknik Penunjang**

Teknik penunjang dalam penelitian ini adalah:

### **a. Wawancara**

Teknik penunjang dalam pengumpulan data ini untuk mendapatkan data yang belum didapatkan ketika melalui teknik pengumpulan data berupa angket. Maka dari itu, teknik wawancara perlu untuk dilakukan. Adapun teknik wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara bebas dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak disiapkan sebelumnya, dengan bertatap muka secara langsung dengan responden. Wawancara dilakukan oleh peneliti dengan Kepala Sekolah, Guru dan peserta didik SMP negeri 1 Padangratu untuk mendapatkan informasi tambahan terkait Peran Guru PPKn Dalam Upaya Penguatan Nilai-Nilai Kebhinnekaan di SMP Negeri 1 Padangratu Lampung Tengah Tahun Pelajaran 2017/2018.

### **b. Dokumentasi**

Teknik dokumentasi ini dilakukan agar dapat mendukung hasil proses pengumpulan data. Adapun data tertulis yang diperoleh melalui teknik dokumentasi ini yaitu berupa dokumen atau naskah profil sekolah, sejarah sekolah, jumlah guru dan jumlah siswa di SMP Negeri 1 Padangratu Lampung Tengah.

### **c. Observasi**

Teknik observasi dilakukan untuk melihat keadaan tempat penelitian dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap fokus penelitian yakni peserta didik.

## **G. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas**

### **1. Uji Validitas**

Menurut Suharsimi Arikunto (2010:211) “validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen.” Hal tersebut berarti suatu alat dikatakan valid apabila mampu secara tepat menunjukkan besar kecilnya suatu gejala yang diukur. Maka dalam hal ini alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini berupa validitas logis dengan cara *judgement* yaitu dengan mengkonsultasikan dengan dosen ahli penelitian di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, khususnya dosen pembimbing I dan pembimbing II. Setelah dinyatakan valid maka angket tersebut dapat digunakan sebagai alat pengumpul data dalam penelitian ini.

## 2. Uji Reliabilitas

Menurut Arikunto (2010:170) menyatakan bahwa “reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa sebuah instrumen cukup dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data karena instrumen tersebut sudah baik”. Suatu alat ukur dikatakan reliabel apabila tes tersebut menunjukkan hasil-hasil yang tetap dan akurat, serta alat ukur yang digunakan akan diadakan uji coba terlebih dahulu.

Uji coba angket dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyebarkan angket kepada 10 orang di luar responden
2. Hasil item ganjil dan item genap dikorelasikan dengan rumus *Product moment* yaitu:

*moment* yaitu:

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{N \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{N \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Keterangan:

$R_{xy}$  : Koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y

$X$  : Skor rata-rata dari X

$Y$  : Skor rata-rata dari Y

$N$  : Jumlah Sampel

(Suharsimi Arikunto, 2010:317)

Kemudian dicari reliabilitasnya dengan menggunakan rumus *Spearman Brown* menurut Suharsimi Arikunto (2010:223) sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{2(r_{gg})}{1 + (r_{gg})}$$

Keterangan:

$r_{xy}$  : Koefisien reliabilitas seluruh item

$r_{gg}$  : Koefisien antara item X dan Y

Hasil analisis kemudian dibandingkan dengan tingkat reabilitas dengan kriteria sebagai berikut:

0,90 – 1,00 : Reliabilitas Tinggi

0,50 – 0,89 : Reliabilitas Sedang

0,00 – 0,49 : Reliabilitas Rendah

## H. Teknik Analisis Data

Mengalisis data merupakan suatu langkah kritis dalam penelitian dengan tujuan untuk mencari kebenaran data tersebut dan mendapatkan suatu kesimpulan dan hasil penelitian yang telah dilakukan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kuantitatif. Analisis data kuantitatif dengan menggunakan data-data berbentuk angka. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data sebagai berikut :

$$I = \frac{NT - NR}{K}$$

Keterangan:

$I$  : Interval

$NT$  : Nilai Tinggi

$NR$  : Nilai Rendah

$K$  : Kategori Interval

Selanjutnya disajikan dalam bentuk presentase pada setiap tabel kesimpulan.

Rumus presentase yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

$P$  : Presentase

$F$  : Frekuensi pada kategori variabel yang bersangkutan

$N$  : Jumlah frekuensi dari seluruh klasifikasi kategori variabel

Selanjutnya untuk mengetahui banyaknya presentase yang diperoleh maka digunakan dengan kriteria yang ditafsirkan sebagai berikut :

76% - 100 % = Baik

56% - 75% = Sedang

40% - 55% = Tidak Baik

Adapun mengolah dan menganalisis data dalam penelitian ini digunakan dengan rumus Chi kuadrat, Sudjana (2009:280) yaitu :

$$\chi^2 = \sum_{i=j}^B \sum_{j=i}^k \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}}$$

Keterangan :

$X^2$  = Chi kuadrat

$\sum_{1=j}^B$  = Jumlah Baris

$\sum_{j=1}^k$  = Jumlah Kolom

$o_{ij}$  = Frekuensi Pengamatan

$E_{ij}$  = Frekuensi yang diharapkan

Kriteria uji sebagai berikut:

- a. Jika  $X^2$  hitung lebih besar atau sama dengan  $X^2$  tabel dengan taraf signifikan 5 % maka hipotesis diterima
- b. Jika  $X^2$  hitung lebih kecil atau sama dengan  $X^2$  tabel dengan taraf signifikan 5% maka hipotesis ditolak.

Untuk menguji keeratan maka digunakan rumus kontigensi, Sudjana,

(2009:282) sebagai berikut :

$$C = \sqrt{\frac{x^2}{x^2+n}}$$

Keterangan :

C : Koefisien Kontigensi

$X^2$  : Chi Kuadrat

N : Jumlah Sampel

Agar C diperoleh dapat dipakai untuk derajat asosiasi antara faktor-faktor diatas maka harga C dibandingkan koefisien maksimum yang biasa terjadi maka harga maksimum ini dapat dihitung dengan rumus :

$$C_{maks} = \sqrt{\frac{m-1}{m}}$$

Keterangan :

$C_{maks}$  : Koefisien Kontigensi Maksimum

M : Harga Maksimum antara baris dan kolom

1 : Bilangan Konstan

Uji pengaruh makin dekat harga C pada C maksimum maka makin besar derajat asosiasi antara variabel. Dengan kata lain, faktor yang satu semakin berkaitan dengan faktor yang lain, Sudjana (2009:282).

## **V. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Peran guru PPKn dapat dikategorikan pada kategori berperan. Hal ini berdasarkan analisis data mengenai memberikan pemahaman, mengarahkan dan mengawasi yang berada pada kategori baik. Peserta didik sudah mampu memahami peran guru dengan baik karena sudah mampu memahami tiga hal penting dalam peran guru itu sendiri yaitu mengenai memberikan pemahaman, mengarahkan dan mengawasi dalam pembelajaran PPKn. Peran guru dalam upaya penguatan nilai-nilai kebhinnekaan dikategorikan pada kategori berperan, dimana guru mengajarkan kepada peserta didik akan pentingnya nilai-nilai kebhinnekaan. Hal ini dapat ditunjukkan melalui analisis data terhadap penilaian tiga hal yaitu menggali nilai-nilai kebhinnekaan, menanamkan nilai-nilai kebhinnekaan dan menguatkan nilai-nilai kebhinnekaan, dimana peserta didik menganggap dan menyadari bahwa nilai-nilai kebhinnekaan di dalam sekolah itu sangat penting agar dapat menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa peran guru PPKn dalam upaya penguatan nilai-nilai kebhinnekaan di SMP Negeri 1 Padangratu Lampung Tengah Tahun Pelajaran 2017/2018 dapat berperan dengan baik.

## **B. Saran**

Setelah penulis menyelesaikan, membahas, menganalisis data dan mengambil kesimpulan dari hasil penelitian maka penulis ingin memberi saran kepada :

1. Kepala Sekolah hendaknya untuk selalu mengontrol para guru, karyawan dan peserta didik untuk dapat saling menumbuhkan nilai-nilai kebhinnekaan di dalam lingkungan sekolah.
2. Guru hendaknya berperan secara maksimal dalam upaya penguatan nilai-nilai kebhinnekaan agar dapat melaksanakan nilai-nilai yang terkandung dalam bhinneka tunggal ika dengan baik.
3. Peserta didik hendaknya untuk selalu menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam prinsip kebhinnekaan yang ada di sekolah agar dapat menciptakan hubungan yang harmonis yang optimal di dalam sekolah khususnya di SMP Negeri 1 Padangratu Lampung Tengah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2009. *Evaluasi Program Pendidikan*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Baharuddin & Wahyuni, E. N. (2008). *Teori Belajar dan Pembelajaran*. Yogyakarta: Ar-ruzz media.
- Dewantara, K.H. (1954). *Ki Hadjar Dewantara*. Jogjakarta: Madjelis-Leluhur Taman-Siswa.
- Djamarah, S. B & Zaim, A.1997. Strategi belajar mengajar. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hasyim, Adelina.2015.Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Berbasis Pendidikan Karakter.Yogyakarta: Media Akademi.
- Kansil.2011.Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara.Jakarta: PT.Rieneka Cipta.
- Koentjaraningrat. 2011. Pengantar Ilmu Antropologi 1. Jakarta:PT Rineka Cipta.
- Kurnia,Anwar.2010.Ilmu Pengetahuan Sosial Terpadu.Jakarta:PT Rieneka Cipta.
- Liliweri, Alo.2007.Dasar-Dasar Komunikasi Antar Budaya.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nawawi, Hadari.2003.Metode Penelitian Bidang Sosial.Yogyakarta:Gajah Mada Press.
- Prasetya,Joko.2004.Ilmu Budaya Dasar.Jakarta:PT Rieneka Cipta.
- Rizal Mustansyir. 1995. “Bhinneka Tunggal Ika dalam Perspektif Filsafat Analitik”, dalam Jurnal Filsafat, Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Samovar, Larry.2010.Komunikasi Lintas Budaya. Jakarta:Salemba Humaika.
- Setiadi, Elly.2008.Ilmu Sosial dan Budaya Dasar. Jakarta:Kencana Prenada Media Grup.
- Soedjono, D.1997.Pokok-Pokok Sosiologi Sebagai Penunjang Studi Hukum.Bandung:PT.Ombak.
- Soekanto, Soerjono.2008.Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono, 2002. *Teori Peranan*. Bumi Aksara. Jakarta.

Soeleman, Munandar.2008.IlmU Sosial Dasar.Bandung:PT. Refika Aditama

Sudjana.2002.Metode Statiska.Bandung:Tarsito.

Sugiyono.2013.Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: CV Alfabeta.

Thoha, Miftah. 1997. *Pembinaan Organisasi*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Tim Pendidikan Karakter .2010. Pendidikan Karakter Di SMP Kementerian Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru & Dosen.

Warsito.2012.Antropologi Budaya.Yogyakarta: Ombak.